



*Press Release*

**CORE Quarterly Review 2024**

“Tantangan Ekonomi di Tengah Transisi Pemerintahan”

Jakarta, 25 April 2024

Tahun 2024 memiliki makna strategis bagi Indonesia karena pada tahun ini digelar perhelatan akbar pesta demokrasi, yakni pemilihan umum (PEMILU) dan pemilihan legislatif (PILEG) yang telah diselenggarakan serentak pada Februari 2024. Adapun pemilihan kepala daerah (PILKADA) akan diselenggarakan pada bulan November mendatang. Perhelatan akbar ini tidak hanya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan konsumsi baik pemerintah maupun swasta, tetapi juga menjadi penentu arah kebijakan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Sayangnya, pada tahun ini ekonomi dunia masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dengan kecenderungan ekonomi global yang kondisinya relatif masih sama seperti tahun 2023, perlambatan ekonomi di negara-negara berkembang, pelemahan nilai tukar rupiah dan konflik geopolitik yang sewaktu-waktu dapat mengganggu rantai pasok dunia dan dapat berimplikasi pada terkereknya harga energi dan pangan. Di tingkat nasional, tahun 2024 merupakan periode transisi pemerintahan. Pemerintahan baru menghadapi berbagai tantangan dari global untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Mencermati perkembangan sepanjang paruh pertama 2024, CORE Indonesia mengestimasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama akan lebih mendekati **angka 4,9-5,1%**. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih ditopang oleh **konsumsi yang tumbuh moderat** di tiga bulan pertama tahun 2024. Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah 2024 memang terbuka lebar, terlebih dengan usainya Pemilu yang memberikan kepastian kepemimpinan nasional untuk lima tahun ke depan. Meski demikian, sejauh mana perbaikan ekonomi tersebut masih akan sangat ditentukan oleh kesungguhan presiden dan tim ekonominya menjalankan agenda ekonominya sesuai dengan visi dan misi serta sejauh mana konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut.

Global Tumbuh Stabil

**Kondisi perekonomian dunia hingga akhir tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh stabil, sama seperti tahun 2023.** Pada awal April 2024, IMF melakukan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih optimis di tahun ini. Pada Oktober tahun lalu, IMF sebenarnya pesimis dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang akan tumbuh lebih lambat dari 3,0% pada 2023 menjadi 2,9% di tahun ini. Namun pada April 2024, IMF mengoreksi pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih stabil, yaitu sebesar 3,2%.

**Optimisme ini terutama dipicu oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS).** Pertumbuhan ekonomi AS diprediksi meningkat dari 2,5% pada 2023, menjadi 2,7% pada tahun ini, sementara ekonomi di Kawasan Eropa

diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 0,8% di tahun ini, meningkat dibanding tahun 2018/23 yang hanya mencapai 0,4%.

**Meski begitu, perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging market* dan berkembang terutama China, India, dan Rusia akan sedikit mengimbangi akselerasi tersebut.** Pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging market* dan berkembang diprediksi melambat dari 4,3% pada 2023, menjadi 4,2% pada tahun ini.

**Sejalan dengan pertumbuhan PDB yang stabil, perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada tahun ini.** Peningkatan volume perdagangan dunia ini terjadi terjadi pada negara maju, *emerging market* dan berkembang. Meskipun konflik geopolitik masih terjadi, namun perdagangan diprediksi tetap tumbuh, didorong oleh pergeseran pola perdagangan antar blok.

**Peningkatan output global diproyeksikan akan diiringi oleh penurunan inflasi secara perlahan pada tahun ini.** Tingkat inflasi global diprediksi menurun dari 6,8% pada 2023, menjadi 5,9% pada tahun ini. Penurunan inflasi utamanya terjadi pada negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan di Kawasan Eropa. Tingkat inflasi di Amerika Serikat telah turun dari 5% pada Maret 2023, menjadi 3,5% pada Maret 2024. Sedangkan, tingkat inflasi di Kawasan Eropa, juga mengalami penurunan yang tajam dari 6,9% pada Maret 2023, menjadi 2,4% pada Maret tahun ini.

**Suku bunga European Central Bank (ECB) diyakini akan mulai dipangkas pada bulan Juni, sejalan dengan penurunan tingkat inflasi Kawasan Eropa yang semakin mendekati target 2%.** Rilis data oleh Eurostat menunjukkan bahwa inflasi pada bulan Maret 2024 berada pada tingkat 2,4%. Angka ini semakin mendekati target yang ditetapkan oleh ECB, yaitu sebesar 2%. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Christine Lagarde (Presiden ECB) mengatakan bahwa berdasarkan penilaian terbaru, langkah pemangkasan suku bunga adalah langkah yang tepat.

**Meskipun inflasi di Amerika Serikat telah menurun secara tahunan, namun peningkatan permintaan pada kuartal I 2024 dikhawatirkan akan menunda pemangkasan suku bunga FFR (Federal Funds Rate) hingga semester II.** Lonjakan permintaan bensin dan produk destilasi di AS, telah mendorong kenaikan harga minyak mentah brent hingga 13% (Ytd) menjadi \$86,97 per barel pada Maret 2024. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya harga bensin dan menghambat penurunan inflasi AS pada bulan Maret 2024.

**Respon Iran untuk tidak membalas dugaan serangan Israel di Isfahan telah meredakan konflik Timur Tengah dan berdampak pada stabilitas harga minyak dunia di tengah peningkatan demand AS untuk sementara waktu.** Meski begitu, peningkatan eskalasi antara Israel dan Iran dapat mengganggu arus perdagangan selat Hormuz yang berperan penting atas 30% volume perdagangan minyak global. Peningkatan eskalasi diprediksi berpotensi membawa harga minyak mentah brent menembus angka \$90 per barel.

Di sisi lain, keberlanjutan krisis properti di Tiongkok telah mengurangi demand produk baja di tingkat domestik, dan berdampak pada penurunan harga bijih besi dan baja. Ini disebabkan karena produsen baja Tiongkok mulai mengalihkan outputnya ke pasar global, sehingga terjadi kondisi *oversupply* yang mengganggu keseimbangan harga. Hingga Maret 2024, harga bijih besi telah turun sebesar 19% (Ytd) menjadi \$109 per ton. Sedangkan, pada periode yang sama, harga baja rebar telah turun sebesar 13% (Ytd) menjadi CNY 3.421 per ton.

## Ekonomi Domestik Pasca Pemilu

**Pertumbuhan ekonomi domestik tahun ini akan lebih banyak bergantung pada stabilitas daya beli dan konsumsi masyarakat dan dorongan belanja pemerintah.** Pasalnya, kondisi perekonomian dunia yang tumbuh stabil seperti tahun 2023 dan perlambatan ekonomi di negara berkembang akan lebih banyak menekan sumber pertumbuhan terutama dari sisi ekspor.

**Dari sisi ekspor, transmisi ekonomi global berupa krisis berlanjutnya krisis properti Tiongkok disertai dengan masih berlanjutnya moderasi harga komoditas mendorong terkontraksinya ekspor Indonesia yang berkelanjutan.** Pada Q1-2024 pertumbuhan ekspor secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 7,55%, dan Impor dengan periode yang sama juga mengalami kontraksi sebesar 0,10%.

**Potensi penyempitan surplus akan berlanjut jika harga komoditas masih mengalami moderasi serta permintaan dari negara mitra masih belum menguat.** Meskipun dari sisi nilai terkontraksi namun dari sisi kuantitas (volume) ekspor dan impor menunjukkan pertumbuhan meskipun melambat. Pada Q1-2024 volume ekspor menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,50% (Yoy), sementara impor tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 14,37% (Yoy). Hal ini terjadi karena adanya penurunan harga komoditas yang masih berlanjut. Oleh karena hal tersebut surplus perdagangan Q1-2024 menyempit dibandingkan dengan Q1-2023. Secara kumulatif Jan-Mar 2023 mencatatkan surplus dagang sebesar 12,19 miliar USD, sementara pada periode Jan-Mar 2024 mencatatkan surplus lebih kecil yaitu sebesar 7,34 miliar USD.

**Berlanjutnya krisis properti di Tiongkok pada kuartal ini mentransmisikan penurunan permintaan Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia pada barang-barang ekspor Indonesia.** Pada Q1-2024 ekspor Indonesia ke Tiongkok mencatatkan kontraksi sebesar 16% di tengah pertumbuhan ekspor Indonesia ke mitra dagang lain seperti Amerika, Uni Eropa, dan India. Krisis properti Tiongkok juga menekan kinerja ekspor besi dan baja Indonesia, tercatat kontraksi sebesar 1,31%

**Potensi barang impor ilegal dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia tercatat masih relatif besar.** Masih terdapat jumlah selisih yang besar pada pencatatan data impor yang dilakukan Indonesia ke Tiongkok dengan data ekspor yang dilakukan Tiongkok ke Indonesia. Pada Q4-2023 misalnya mencatatkan selisih sebesar 442,1 juta USD. Jumlah selisih ini terindikasi menjadi adanya potensi barang impor ilegal. Kondisi didorong oleh adanya perlakuan *friend shoring* kemitraan dagang Indonesia dengan Tiongkok.



Grafik 1. Potensi Impor Ilegal Indonesia dari Tiongkok

Sumber: National Bureau of Statistics of China, The People's Bank of China, & General Administration of Customs of the People's Republic of China (2024)

**Konflik geopolitik Iran-Israel tidak memiliki transmisi langsung terhadap kinerja perdagangan Indonesia.** Kontribusi pasar Iran dan Isarel terhadap pangsa pasar ekspor-impor Indonesia tidak signifikan. Kemudian kedua negara tersebut juga bukan merupakan

mitra dagang Indonesia di kawasan timur tengah. Ekspor Indonesia ke Iran dan Israel hanya berkontribusi masing-masing sebesar 0,075% dan 0,064% terhadap total ekspor Indonesia di 2023. Sementara kontribusi Impor dari Iran dan Israel masing-masing sebesar 0,005 dan 0,01 dari total Impor Indonesia di 2023.

**Baik Iran maupun Israel juga bukan pasar dengan kondisi emerging bagi Indonesia, yakni pasar yang justru menunjukkan tren permintaan yang negatif.** Meskipun demikian Indonesia memiliki ratifikasi perjanjian dagang dengan Iran "*Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement/II*", sehingga meskipun kontribusi dagang Iran kecil apabila terdapat gejolak dengan negara tersebut akan memiliki pengaruh terhadap perdagangan Indonesia. Sementara dengan Israel Indonesia belum menandatangani ratifikasi perjanjian dagang.

**Pelemahan ekspor dan impor pada kuartal pertama 2024, pelemahan nilai tukar, dan meningkatnya harga komoditas dunia menjadi faktor utama menurunnya neraca perdagangan Indonesia**

**Disisi lain, penyelenggaraan pemilu pada Februari 2024 lalu mendorong meningkatnya tingkat konsumsi LNPRT secara signifikan pada awal tahun 2024.** Efek dari pemilu terhadap konsumsi LNPRT diproyeksikan mendorong peningkatan sebesar **20,25%-26,32%** dibandingkan kuartal pertama tahun 2023. Efek pemilu terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga nampaknya cenderung terbatas sampai pada semester pertama saja, khususnya triwulan pertama 2024.

**Pemilihan umum dan bulan Ramadhan yang bertepatan pada akhir kuartal pertama 2024 meningkatkan konsumsi rumah tangga secara moderat di awal tahun 2024,** meskipun mengalami tekanan dari inflasi pangan yang meningkat. Selama ramadhan dan idul fitri, mobilitas masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini juga tercermin dari pertumbuhan Indeks Penjualan Ril (IPR) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tumbuh 12,9% pada Q1-2024, dari periode yang sama tahun lalu -11,2%. Sementara mobilitas pada hari raya tergambar dari total pergerakan penumpang angkutan lebaran 2024 yang bahkan sudah melampaui kondisi pra-pandemi 2019. Meski kondisi perekonomian idul fitri akan tercatat di kuartal berikutnya, peningkatan mobilitas di hari raya dapat memengaruhi kondisi kuartal pertama 2024 dari segi persiapan, seperti peningkatan suku cadang dan aksesori yang tumbuh 10,3% di Q1-2024.

**Meski mobilitas tumbuh selama kuartal pertama dan keyakinan konsumen optimis (IKK>100), kondisi ini terlihat tidak diikuti oleh belanja tersier seperti barang budaya dan rekreasi oleh konsumen.** IPR kedua barang ini masih melanjutkan kontraksi dari tahun sebelumnya, dari -0,8% menjadi -7,7%, dan proporsi pengeluaran konsumen untuk melakukan konsumsi juga menurun di Q1-2024. CORE Indonesia memproyeksikan efek dari pemilu dan bulan suci Ramadhan ini dapat mendorong konsumsi rumah tangga sebesar **4,83%-5,44%** dibandingkan kuartal pertama tahun 2023.

**Nilai PMTB pada kuartal pertama tahun 2024 diprediksi masih relatif stabil selama kuartal pertama tahun 2024** dengan estimasi pertumbuhan sebesar **4,51%**. Menurut Prediksi CORE Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 diproyeksikan masih stabil dengan pertumbuhan sebesar 4.9% hingga 5.1%.

#### Lampu Kuning Daya Beli Masyarakat

**Meski secara indikator makro nampaknya masih cukup baik, namun daya beli Masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja.** Inflasi pangan yang tinggi, menggerus daya beli Masyarakat. Ha ini tercermin dari penurunan inflasi inti sejak awal tahun 2023.

Bahkan pada kuartal pertama 2024, tingkat inflasi intinya hampir menyamai tingkat inflasi ini pada kuartal keempat tahun 2020 ketika pandemi Covid-19.

**Tak hanya itu, penurunan juga terlihat dari pertumbuhan tahunan pengeluaran makanan riil pada seluruh kelompok masyarakat pada Maret 2023.** Salah satu sumber utama penggerus daya beli masyarakat adalah kenaikan harga pangan. Pasalnya, separuh lebih porsi pengeluaran per kapita 80% masyarakat Indonesia digunakan untuk membeli makanan. Pelemahan daya beli juga dapat dilihat dari persentase pengeluaran barang-barang sekunder dan tersier yang menurun, yaitu pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, barang tahan lama, dan aneka barnag dan jasa.

**Di tengah kondisi ekonomi yang menekan daya beli, konsumsi rumah tangga kelas bawah masih tertolong oleh bansos, sementara kelas menengah semakin tergerus.** Meningkatnya bantalan bagi kelas bawah terlihat dari pertumbuhan tahunan belanja bansos yang meningkat menjadi 19,33% dari tahun sebelumnya -7%. Sementara penurunan kelas menengah yang menjadi kontributor terbesar konsumsi Indonesia terlihat dari pertumbuhan tahunan penjualna kendaraan bermotor, lebih rendahnya penerimaan PPN & PPnBM, serta melambatnya pertumbuhan tahunan indeks pembelian barang tahan lama serta indeks penjualan riil untuk barang budaya dan rekreasi.

**Wacana pemerintah untuk sementara waktu tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini, tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan harga dalam beberapa bulan kedepan** sebagai respon dari peningkatan harga dunia akibat konflik geopolitik Iran-Israel. Jika pemerintah menaikkan harga BBM, maka tingkat inflasi barang diatur pemerintah akan kembali melonjak. Sepanjang Q1-2024, inflasi barang diatur pemerintah terkendali akibat tidak ada kenaikan harga BBM subsidi, tarif PDAM, dan tarif dasar listrik yang mengalami stagnasi.

Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, tarif dasar listrik, dan tarif PDAM, proyeksi inflasi pada 2024 ada dikisaran 2,5%-3,5% (YoY). Namun apabila tidak mengalami kenaikan harga pada tahun ini, maka inflasi akan berada pada kisaran 2,5 – 3,0 persen (YoY) sesuai dengan proyeksi CORE Indonesia pada Outlook 2024 lalu.

#### Industri Perbankan di Tengah Perpanjangan Era Suku Bunga Tinggi

**Ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga FFR telah berdampak pada pelemahan nilai Rupiah sebesar 5% (Ytd per April 2024), menjadi Rp16.160 per US\$.** Salah satu faktor pendukung utama dari pelemahan nilai tukar Rupiah adalah besarnya nilai transaksi jual bersih atau net outflow oleh investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN). Pada bulan Maret 2024, nilai transaksi jual bersih investor asing mencapai Rp27,2 triliun. Ini merupakan nilai net outflow terbesar sejak periode September 2022.

**Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan BI-Rate naik menjadi 6,25%, di tengah pelemahan rupiah dan potensi penundaan pemangkasan FFR.** Langkah ini merupakan respon dari tren depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup mengkhawatirkan sejak pertengahan Maret 2024. Kurs JISDOR menyentuh Rp16.280/USD pada 19 April 2024, yang mana merupakan level terendah semenjak awal pandemi 2020. Selain itu, langkah ini dinilai tepat ditengah terus menurunnya cadangan devisa Bank Indonesia sebagai instrumen untuk mengendalikan nilai tukar Rupiah.

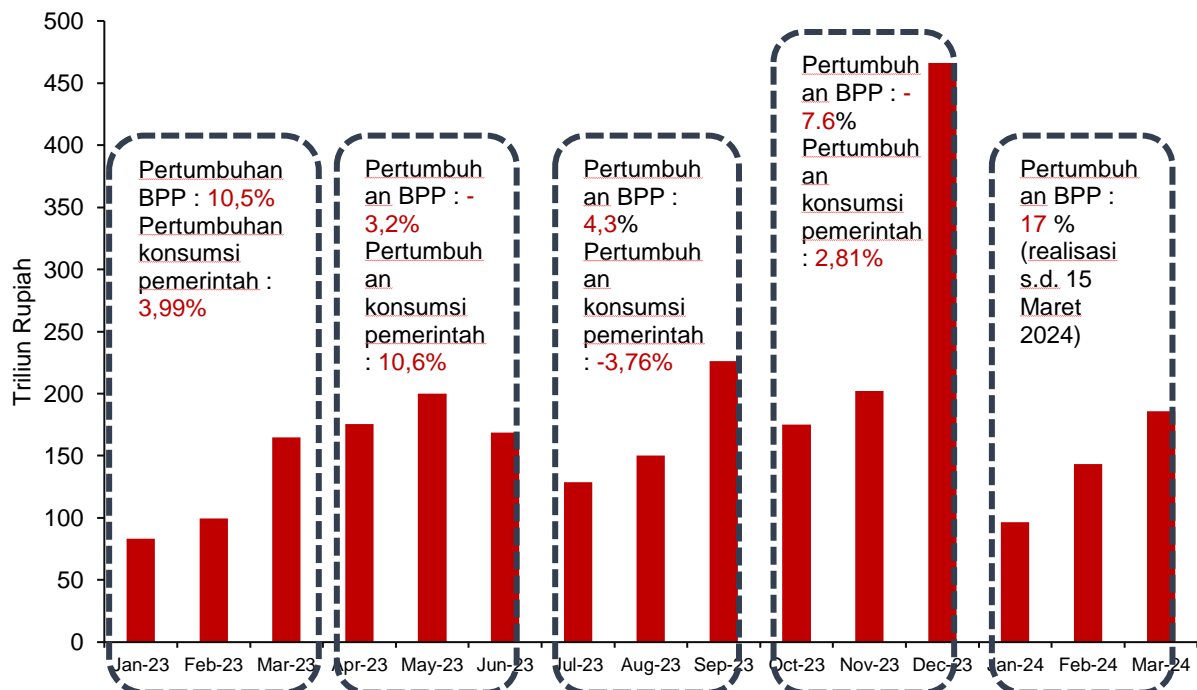
**Disisi lain, sektor perbankan mulai menunjukkan sinyal yang kurang baik, di tengah perpanjangan era suku bunga tinggi.** Pertumbuhan kredit yang 2 kali lebih tinggi dibanding DPK telah membuat likuiditas (LDR) bank semakin mengetat. Namun, di tengah tingginya pertumbuhan kredit, profitabilitas (net interest margin) bank umum per Februari 2024 justru

turun 0,2% menjadi 4,49% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan pendapatan operasional akibat tingginya biaya modal merupakan penyebab utama dari kondisi tersebut.

**Penanaman Modal Asing akan memerlukan dorongan untuk mencapai target investasi 2024 di tengah ketidakpastian global yang belum membaik pada kuartal pertama tahun ini.** Target penanaman modal untuk tahun 2024 naik sebesar 17,8% menjadi Rp1.650 triliun, yang mana PMA ditargetkan berkontribusi setidaknya 52% dari keseluruhan penanaman modal. Walaupun nilai realisasi investasi oleh BKPM menunjukkan peningkatan sebesar 17,5% di tahun 2023, dengan realisasi PMA tumbuh 13,7%, data BI mengenai nilai aliran investasi langsung di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan sepanjang tahun 2023. Secara garis besar, kuartal pertama tahun 2024 diawali dengan berlanjutnya tingkat kehati-hatian dan wait and see investor oleh karena perkembangan tahun politik dan situasi global.

### Memacu Stimulus Fiskal

**Kebijakan fiskal masih ekspansif meskipun pemerintah sempat melakukan kebijakan *Automatic Adjustment*.** *Automatic Adjustment* menjadi salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan pada kuartal pertama untuk melakukan penghematan di beberapa pos anggaran karena potensi penurunan harga komoditas dan potensi instabilitas pertumbuhan ekonomi global. Dalam kebijakan ini pemerintah menilai perlu melakukan penghematan sejak dini, terutama untuk kelompok belanja yang bisa dihemat, diantaranya belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.



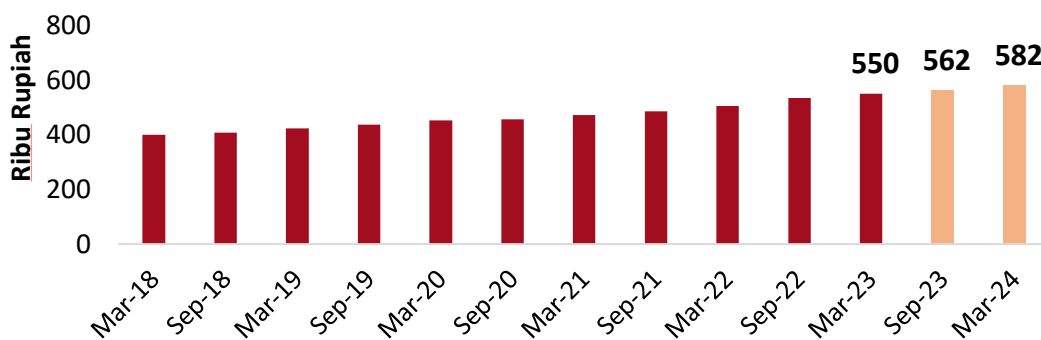
Grafik 2. Realisasi Bulanan Belanja Pemerintah Pusat

Sumber : Kementerian Keuangan

Hal ini tercatat pada porsi realisasi untuk belanja pegawai dan belanja modal yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Meski demikian, kelompok belanja bantuan sosial dan belanja barang terlihat tidak terdampak dari kebijakan ini. Belanja barang mencatatkan realisasi 15,1 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara belanja bantuan sosial mencatatkan pertumbuhan 19,3 persen.

Sehingga secara agregat, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar 17%. Peningkatan ini tentu dapat berkontribusi terhadap komponen konsumsi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama 2024.

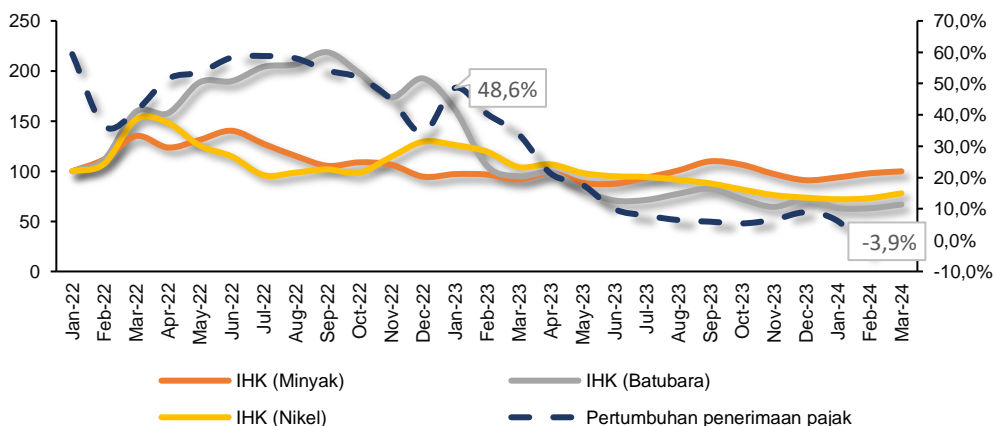
**Upaya pemerintah dalam mendorong realisasi belanja bantuan sosial tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial ekonomi.** Pada Maret 2024, inflasi untuk produk makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,43 dari tahun sebelumnya. Beras sebagai komoditas penyumbang garis kemiskinan terbesar, mengalami peningkatan harga sebesar 20,3 persen pada Maret 2024 (yoy). Adanya kenaikan harga komoditas pokok akan membatasi pengeluaran sehingga sehingga penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk memastikan pengeluaran beberapa kelompok masyarakat tertentu tidak berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu, secara politik anggaran, pemerintah tentu tidak ingin menutup masa pemerintahan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.



Grafik 3. Proyeksi Garis Kemiskinan Indonesia

\*Proyeksi menggunakan asumsi: Kenaikan 1 inflasi akan menaikkan 1,86% garis kemiskinan  
 Sumber: BPS (Diolah)

**Ekspansi fiskal di awal tahun akan mendorong terjadinya defisit anggaran lebih cepat dibandingkan tahun lalu.** Terjadi pertumbuhan penerimaan pajak yang melambat imbas dari periode normalisasi harga komoditas saat ini. Grafik 3 menunjukkan selarasnya Indeks Harga Komoditas dan pertumbuhan penerimaan pajak. Ketika harga komoditas mengalami peningkatan maka anggaran pendapatan negara mendapatkan berkah atau *windfall* yang akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Sayangnya, pada kuartal pertama, perlambatan harga komoditas juga akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 80% dari penerimaan negara. Dari kondisi tersebut, defisit anggaran berpotensi akan mulai terjadi di periode kuartal dua sampai kuartal tiga tahun ini.



Grafik 3. Pertumbuhan kumulatif penerimaan perpajakan dibandingkan Indeks Harga Komoditas

Sumber: Kementerian Keuangan

## Menanti Gebrakan Presiden Terpilih

**Kebijakan fiskal juga perlu mengantisipasi proses transisi kebijakan dari pemerintah saat ini ke pemerintah terpilih.** Sebagai ilustrasi, pemerintah baru akan menjalankan program makan siang gratis. Target penerima program makan siang dan susu gratis sekitar 82,9 juta penduduk yang merupakan pelajar, balita dan ibu hamil. Untuk mengetahui estimasi anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan program ini, CORE Indonesia membuat skema anggaran yang terbagi atas pos pengeluaran makan siang dan susu gratis untuk 62,93 juta pelajar yang terdiri dari tingkat Kelas Besar (KB) hingga SMA/Sederajat dan balita usia 1-4 tahun serta program makan siang gratis bagi ibu hamil. **Estimasi kebutuhan anggaran program makan siang dan susu gratis bagi pelajar sebesar Rp 288,85 Triliun dalam setahun jika dilakukan secara serentak.** Sedangkan untuk program makan siang dan susu gratis bagi balita, membutuhkan anggaran sebesar Rp 145,15 Triliun dalam setahun dan bagi ibu hamil membutuhkan anggaran sebesar Rp 19,44 Triliun selama 9 bulan.

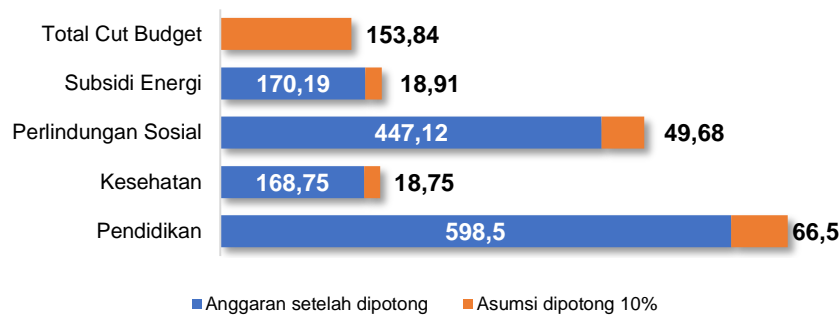
**Total kebutuhan anggaran makan siang gratis dalam setahun mencapai Rp 453,44 Triliun atau setara 13,64 persen dari belanja negara 2024.** Meski demikian, dengan terbatasnya ruang fiskal, kami memproyeksikan program ini, jika jadi dijalankan, akan dilakukan bertahap berdasarkan beberapa periode waktu. Dengan skenario di awal target penerima dipangkas hingga 30%, maka kebutuhan anggaran untuk diproyeksikan lebih kecil atau berada kisaran 136,03 - 181,37 Triliun Rupiah. Di tahapan berikutnya, target penerima akan semakin bertambah dan kisaran kebutuhan anggaran seperti yang terlihat pada tabel 1.

Tahun	Target Penerima Program Makan Siang Gratis	Estimasi Anggaran (Triliun Rupiah)
2025	30%	136,03
2026	40%	181,37
2027	50%	226,72
2028	75%	340,08
2029	100%	453,44

Tabel 1 . Target Penerima dan Estimasi Kebutuhan Anggaran Makan Siang Gratis  
Sumber: CORE Indonesia (diolah)

Adapun untuk sumber pendanaan, terutama di awal program, akan dilakukan dengan kebijakan realokasi anggaran. CORE Indonesia melakukan simulasi perhitungan realokasi anggaran atau *cut budget* dari beberapa pos belanja, diantaranya subsidi energi, perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dengan asumsi pemotongan anggaran sebesar 10%, maka diperoleh dana sebesar Rp153.84 Triliun.





Grafik 4. Simulasi Kebijakan Realokasi Anggaran untuk Program Makan Siang Gratis

Sumber: Kementerian Keuangan, CORE Indonesia

**Pentingnya memperhatikan kebijakan realokasi anggaran adalah untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah baru dalam sektor yang mengalami realokasi budget.**

Hal ini menjadi krusial agar pemotongan anggaran tidak mengganggu pencapaian target-target pemerintah. Sebagai contoh, dalam kasus isu pemangkasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penting untuk mempertimbangkan hasil positif yang telah dicapai oleh program tersebut, terutama dalam konteks pemerataan pendidikan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan kebijakan pemotongan anggaran untuk mendukung program makan siang gratis serta program pemerintah yang sifatnya baru, perlu dilakukan analisis biaya-manfaat yang cermat. Dengan melakukan pemotongan anggaran pada sektor tertentu, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut dapat sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya.

**Analisis biaya dan manfaat juga termasuk melihat contoh penerapan program dari negara lain.**

Di India, melalui program *Mid-Day Meal Scheme* (MDMS) yang melibatkan 125 juta anak di sekitar 1 juta sekolah, harus dihadapkan pada tantangan kasus korupsi dalam pengadaan makanan, rendahnya kualitas pangan, kuantitas yang terbatas, kurangnya kebersihan dalam proses persiapan makanan, serta risiko kontaminasi dari hewan-hewan seperti ular dan kadal. Di sisi lain, China juga menghadapi tantangan serupa dengan program makan siang gratis, termasuk korupsi dalam pengadaan makanan dan peningkatan harga bahan makanan pokok yang memberikan tekanan pada keuangan pemerintah daerah dan sekolah. Tambahan lagi, adanya perbedaan dalam subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kualitas makanan yang beragam di setiap daerah. Dua contoh dari negara ini tentu perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merancang program khusus makan siang gratis.

Selain itu, pemerintahan baru juga dihadapkan pada wacana pendirian Badan Penerimaan Negara. Seperti halnya dalam perencanaan pengeluaran, langkah pertama yang penting sebelum memisahkan otoritas penerimaan negara dari Kementerian Keuangan adalah melakukan studi yang cermat. Berdasarkan pengalaman negara lain yang telah membentuk badan penerimaan negara, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik.

**Perlunya kejelasan dalam sistem, perencanaan, target, serta keahlian manajerial antara Badan Penerimaan Negara dengan Kementerian Keuangan menjadi kunci penting. Hubungan politik dan administrasi pemerintahan juga harus dikelola dengan hati-hati guna memastikan keberhasilan dalam mencapai target penerimaan negara.**

Selain itu, badan penerimaan yang bersifat otonom memiliki beragam jenis, beberapa memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan administratif, sementara yang lain memiliki kewenangan yang terbatas. Oleh karena itu, penyesuaian model badan penerimaan perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara.

**Di sisi lain, pemerintah perlu merencanakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada waktu yang tepat, karena penerapan tarif baru bisa memiliki konsekuensi signifikan, terutama terkait dengan inflasi.** Meskipun kenaikan tarif ini tidak berlaku untuk semua barang, namun dapat mempengaruhi harga barang-barang yang tidak terkena pajak langsung. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif PPN haruslah sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan inflasi dan target kenaikan upah. Dalam jangka panjang, kenaikan tarif PPN dapat diimplementasikan dengan skema multi-tarif untuk beberapa barang, sehingga PPN menjadi progresif seperti Pajak Penghasilan (PPH), bukan regresif. Namun, perlu diakui bahwa penerapan skema ini cukup kompleks, terutama dalam hal identifikasi barang yang terkena dampaknya.[]

Jakarta, 25 April 2024

Mohammad Faisal, Ph.D  
Akhmad Akbar Susanto Ph.D  
Dr. Etikah Karyani  
Muhammad Ishak Razak  
Yusuf Rendy Manilet  
Fathya Nirmala Hanoum  
Eliza Mardian  
Dwi Setyorini  
Fitri Yana  
Lailatun Nikmah  
M. Dzaki Fahd Haekal  
Risky Priscillia  
Rivan Dwi Aghnitama  
Sahaya Aulia Azzahra  
M. Andri

**CORE Indonesia (Center of Reform on Economics)**  
**Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.76A, Jakarta Selatan**  
**Telp : 021-22983998**  
**Fax : 021-22837424**  
**Email : [info@coreindonesia.org](mailto:info@coreindonesia.org)**  
**Web : [www.coreindonesia.org](http://www.coreindonesia.org)**  
**Twitter : [@coreindonesia](https://twitter.com/coreindonesia)**  
**Instagram: [core\\_indonesia](https://www.instagram.com/core_indonesia)**